

DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANJARBARU

PERUBAHAN KEDUA

RENCANA STRATEGIS

(**RENSTRA**)

2016 - 2021

DINAS PERHUBUNGAN
Kota Banjarbaru

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Jend. Sudirman No. 03 . Jend. Sudirman No.03 Telp/Fax (0511)-6749034

Webmail : Admin@dishub.banjarbarukota.go.id

E Mail Personal : Dishub.banjarbarukota@gmail.id

Website Officer : <https://dishubbanjarbaru.wixsite.com/dishubbanjarbarukota>

SKPD Web : dishub.banjarbarukota.go.id





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya maka Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dalam rangka penyelenggaraan pelayanan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini selain berisi rencana program dan kegiatan juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan.

Berbagai data dan informasi yang dimuat dalam Renstra ini dapat digunakan sebagai masukan untuk penyusunan program Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 ini. Untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan sehingga penyusunan Renstra yang akan datang akan lebih baik lagi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis ini.

Harapan kami semoga Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Banjarbaru, Februari 2019
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Banjarbaru

AHMAD YANI, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda
NIP.19641102 198903 1 006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	PENDAHULUAN..... 1
	1.1. Latar Belakang 1
	1.2. Landasan Hukum 2
	1.3. Maksud dan Tujuan 4
	1.4. Sistematika Penulisan 5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... 6
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... 6
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah..... 12
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 15
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD..... 26
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 27
	3.1. Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..... 27
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... 27
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi 29
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 34
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis..... 34
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN 35
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..... 35
BAB V	STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN..... 38
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.. 41
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 48
BAB VIII	PENUTUP..... 50



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang luas. Luasnya kewenangan ini membuka peluang bagi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dalam menetapkan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan jasa pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menuntut adanya profesionalisme dan peningkatan kerja kemampuan aparatur pemerintah untuk dapat memecahkan berbagai masalah yang dihadapi serta mampu mengontrol secara langsung di masa depan.

Pembangunan disektor Perhubungan Kota Banjarbaru ini dilakukan melalui suatu upaya pemikiran dengan suatu visi dan misi yang nantinya dapat mengantisipasi tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah pada umumnya dan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru pada khususnya. Oleh karena itu, tersusunnya Rencana Strategis ini nantinya diharapkan menjadi manifestasi nyata dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkan langkah-langkah kongkrit dari program pembangunan yang mana manfaatnya dapat dirasakan bagi masyarakat.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun mendatang dan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan bersifat indikatif.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru perlu menyusun dokumen perencanaan berupa dokumen Rencana Strategis untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Untuk mewujudkan keterkaitan program pembangunan di Kota, Provinsi maupun Pusat, maka Rencana Strategis juga disusun dengan mengacu dan berpedoman pada rencana pembangunan kota.

Rencana Pembangunan Kota merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/kota dalam jangka



waktu tertentu.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);



9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
16. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembar Daerah



Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 11);

20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru mempunyai maksud sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan rumusan strategi, arah kebijakan dan program serta kegiatan yang harus dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun kedepan dan ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan pokok bagi seluruh pelaku pembangunan di Dinas Perhubungan pada khususnya dan Kota Banjarbaru pada umumnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan tolak ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan.

1.3.2. Tujuan

Berdasarkan maksud di atas, penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 ini mempunyai tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan 5 (lima) tahun ke depan. Langkah berikutnya adalah menjadi acuan penyusunan program dan kegiatan seperti yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dan tolak ukur kinerja yang dapat dicapai.

Rencana Strategis juga bertujuan untuk menyusun suatu dokumen perencanaan Dinas yang komprehensif (menyeluruh) dan mengadopsi kepentingan masyarakat serta memiliki visi dan misi yang dijabarkan dalam Rencana Kegiatan Dinas yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.



1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

5.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

5.1.1. Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru ditetapkan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru mempunyai Tugas membantu Walikota ***Melaksanakan urusan pemerintah Daerah dalam bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.***

Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Sarana Prasarana dan Transportasi;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan
4. Pelaksanaan administrasi penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan umum di bidang Perhubungan;
5. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun unsur – unsur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru terdiri dari ;

A. Bagian Sekretariat

Bagian Sekretariat mempunyai ***tugas pokok*** menyelenggarakan urusan penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Perhubungan;
- 2) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian



dilingkungan Dinas Perhubungan;

- 3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Perhubungan di bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas, Rekayasa dan Data serta Keselamatan Lalu Lintas.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya bidang lalu lintas angkutan jalan mempunyai fungsi ;

- 1) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang lalu lintas angkutan jalan;
- 2) Penyelenggaraan program pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas, perencanaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan;
- 3) Penyelenggaraan program penyusunan dan perencanaan rekayasa lalu lintas jalan kota, provinsi dan nasional dan penyediaan serta pengolahan data lalu lintas.
- 4) Penyelenggaraan program pelayanan bimbingan keselamatan dan ketertiban jalan, analisis daerah rawan kecelakaan, serta penanggulangan kecelakaan lalu lintas.

C. Bidang Sarana Prasarana dan Transportasi

Bidang sarana prasarana dan transportasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang sarana prasarana dan transportasi yang melakukan sebagian tugas pokok Dinas Perhubungan di bidang pengembangan sarana dan prasarana, pengujian dan perbengkelan serta angkutan dan terminal.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya bidang sarana prasarana dan transportasi mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana prasarana dan transportasi;
- 2) Penyelenggaraan program perencanaan penyediaan sarana prasarana



perhubungan, penunjukan lokasi rencana pembangunan terminal, dan halte.

- 3) Penyelenggara program pengawasan pengujian kendaraan bermotor, usaha perbengkelan umum, pengawasan usaha latihan mengemudi;
- 4) Penyelenggaraan program penetapan rencana umum jaringan trayek dan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan.

D. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang. Kegiatan teknis operasional yang dimaksud adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Kegiatan teknis yang dimaksud adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggungjawab langsung Kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

Unit pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru terdiri dari :

a. UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor

Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor yang mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Pengujian Kendaraan bermotor secara berkala dan pengawasan serta pembinaan perbengkelan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

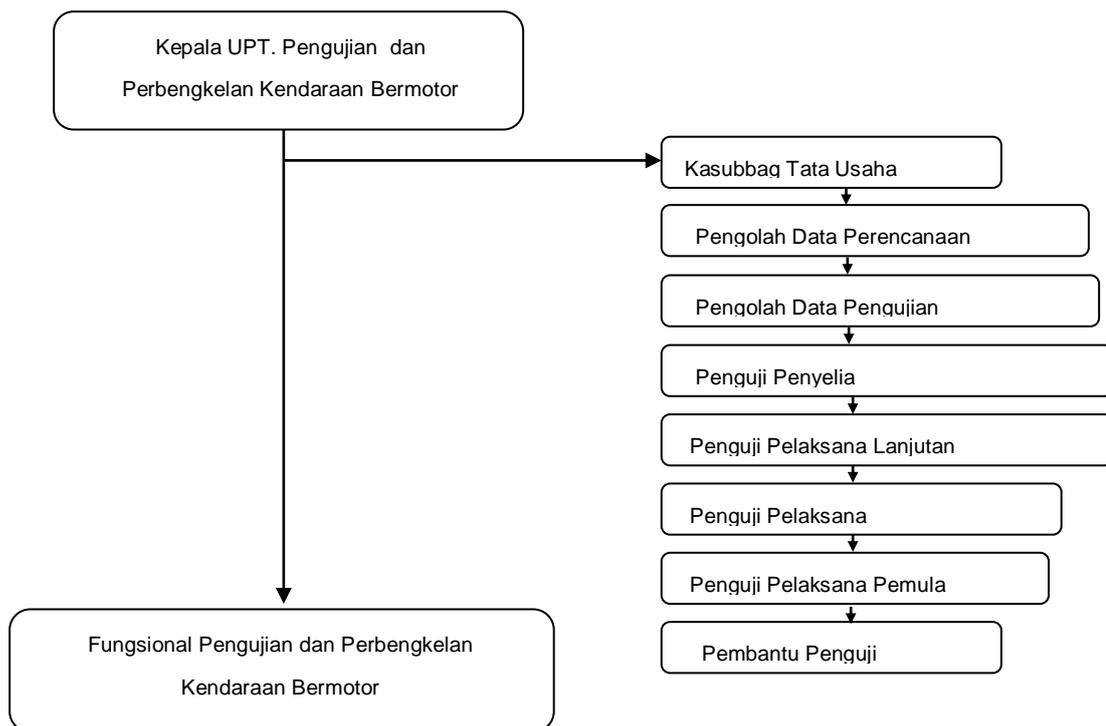
Untuk melaksanakan tugas pokoknya Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pengelolaan pengujian kendaraan bermotor dilingkungan Dinas Perhubungan;



- 2) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor di lingkungan Dinas Perhubungan;
- 3) Pelaksanaan program pengawasan pengujian kendaraan bermotor, usaha perbengkelan umum, pengawasan usaha latihan mengemudi.
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru





b. UPT Pengelolaan Perparkiran

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perparkiraan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Kepala Teknis Dinas Pengelolaan Perparkiran yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perparkiran pada unit pelaksanaan teknis (UPT) pengelolaan parkir, mengelola urusan ketatausahaan, umum dan perlengkapan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan pengelolaan asset sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kepala Dinas Perhubungan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perparkiraan mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pengelolaan perparkiran di wilayah Kota Banjarbaru.
- 2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan perparkiran di wilayah Kota Banjarbaru
- 3) Pelaksanaan sosialisasi peraturan teknis operasional pengelolaan perparkiran di wilayah Kota Banjarbaru
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yan diberikan Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

E. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

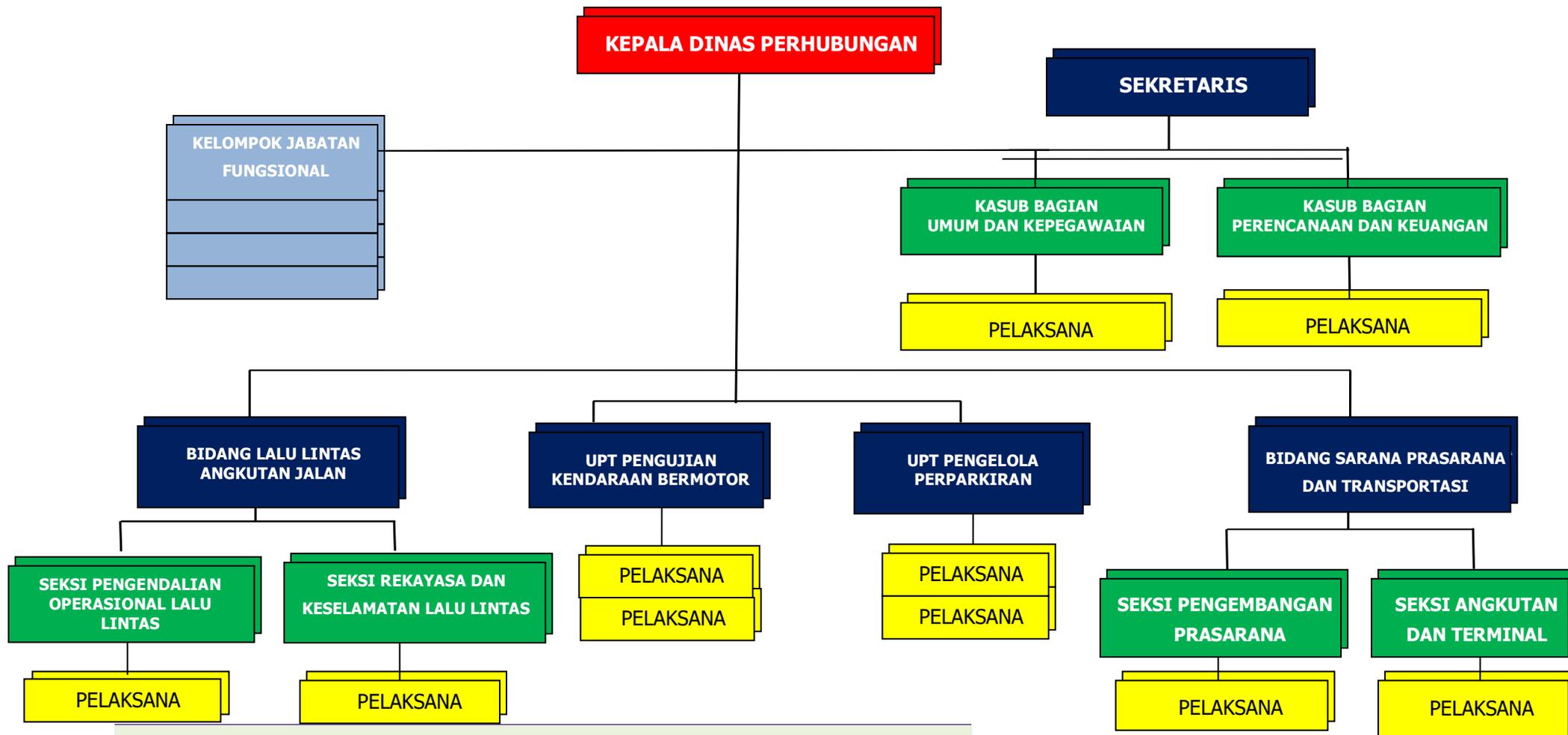
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Lampiran : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor ; 44
Tahun ; 2016

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU





5.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai Dinas Perhubungan pada tahun 2017 seluruhnya sebanyak 62 orang. Terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 40 orang dan Tenaga Kontrak/PTT Sebanyak 23 orang.

Komposisi Pegawai Menurut Golongan/Ruang

No.	Bidang	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	8	6	-	15
3	Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan	1	3	5	-	9
4	Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi	1	3	2	-	6
5	UPT Perparkiran	0	3	3	-	6
6	UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor	1	3	1	-	5
	JUMLAH	5	16	17	-	40

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Data Pegawai	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pegawai Negeri Sipil	36	7	43
2	PTT dan Kontrak	17	15	32
	JUMLAH	53	22	75



2.2.2 Aset Yang Dikelola

Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru mulai tahun 2017 berkantor di Perkantoran Pemerintah Kota Banjarbaru Jl. Jendral Sudirman No. 3 Banjarbaru. Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan adalah berupa peralatan kantor, kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, dan benda tidak bergerak lainnya.

KODE	URAIAN	NILAI (Rp.)
	ASET TETAP	Rp. 11.458.246.995
01	Tanah	Rp. 3.312.897.000
02	Peralatan dan Mesin	Rp. 4.200.263.214
02	Alat-alat Besar	-
03	Alat-alat Angkutan	Rp. 2.232.334.759
04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp. 81.890.995
05	Alat Pertanian	-
06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp. 1.027.783.181
07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Rp. 832.573.418
08	Alat-alat Kedokteran	-
09	Alat Laboratorium	Rp. 35.680.861
10	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	-
03	Gedung dan Bangunan	Rp. 3.935.086.781
11	Bangunan Gedung	Rp. 2.577.326.841
12	Monumen	Rp. 1.357.759.939
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
13	Jalan dan Jembatan	-
14	Bangunan Air/Irigasi	-
15	Instalasi	-
16	Jaringan	-
05	Aset Tetap Lainnya	-
17	Buku dan Perpustakaan	-
18	Barang Bercorak Kebudayaan	-
19	Hewan dan Ternak serta Tanaman	-
20	Aset Renovasi	-
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
	ASET LAINNYA	Rp. 26.393.850
07	Aset Lainnya	Rp. 26.393.850
01	Aset Lainnya	-
21	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	Rp. 26.393.850
22	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-
24	Aset Tidak Berwujud	-



Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru memiliki terminal, sub terminal maupun pangkalan angkutan umum antara lain :

1. Terminal Hero Simpang 4 Banjarbaru
2. Sub Terminal Idaman Banjarbaru
3. Terminal Liang Anggang

Jumlah tempat/lokasi parkir di Wilayah Kota Banjarbaru yang terdaftar pada Dinas Perhubungan sebanyak 145 lokasi yang berizin. Sedangkan tempat/lokasi perparkiran yang dikelola oleh perorangan sebanyak 2 lokasi.

Pelayanan yang ada di Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru melalui Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor berupa :

- a. Perizinan KIR.
- b. Perizinan kaca film (raiben).
- c. Mutasi keluar daerah.
- d. Penghapusan kendaraan bermotor.
- e. Surat keterangan perubahan bentuk.
- f. Surat keterangan status umum.

Berdasarkan Keputusan Walikota Banjarbaru No. 09 tahun 2001 tentang *petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No 27 tahun 2000 tentang izin angkutan dengan kendaraan bermotor umum di jalan* tersedia 9 (sembilan) trayek kota dengan jenis mikrolet untuk melayani angkutan umum penumpang di Banjarbaru, trayek tersebut adalah :

TRAYEK	RUTE
Banjarbaru – Liang Anggang	Banjarbaru – Jl. A. Yani – Simpang tiga Liang Anggang
Banjarbaru – Bangkal	Banjarbaru – Jl. A. Yani – Simpang empat Banjarbaru- Jl. Mr. Cokrokusumo – Cempaka - Bangkal
Banjarbaru – Liang Anggang	Banjarbaru – Guntung Manggis – Transad – Pengayuan – Liang Anggang
Banjarbaru – Liang Anggang	Banjarbaru – Jl. Junjung Buih – Jl. Panglima Batur – Amaco Balitan – SMP 9 – Jl. Syamsudinoor Golf – Jl. A. Yani – Liang Anggang
Banjarbaru – Palam	Banjarbaru – Jl. A. Yani – Sungai Rancah – Palam
Banjarbaru – Sei. Ulin	Banjarbaru – Jl. P. Suriansyah – Jl. Panglima Batur – Jl. Sukarelawan – Jl. A. Yani – Simpang empat Banjarbaru – Jl. P.M. Noor – Sei. Ulin
Banjarbaru – Kebun Jeruk	Banjarbaru – Jl. Rambai – Intan Sari – Ratu Elok – Jl. Mr. Cokrokusumo – Kelapa Gading – Kebun Jeruk
Banjarbaru – Cempaka	Banjarbaru – Jl. Kemuning – Guntung Paikat – Jl. Perumnas SMU Unggulan – Cempaka
Banjarbaru – Komp. Bernain	Banjarbaru – Jl. Kemuning – Jl. Beringin – Jl. Manggis – Jl. Rambai – Unlam III – Jl. A. Yani – Jl. P. M. Noor



5.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD (Renja SKPD Tahun 2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2017	
			4		5		6		7		8	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	URUSAN PERHUBUNGAN											
	BIDANG URUSAN											
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan pelayanan internal	100%	3,664,630,880	94.13%	630,836,795	100%	732,926,176	97.07%	711,422,633	97.07%	97.07%
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai	3,750 buah	15,000,000	618	1,830,000	750	3,000,000	750	3,000,000	100%	100.00%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Listrik telepon air dan internet	60 kali	399,990,000	12	74,686,295	12	79,998,000	12	61,087,925	100%	76.36%
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Honorarium jasa kebersihan kantor	60 kali	36,000,000	12	7,200,000	12	7,200,000	12	7,200,000	100%	100.00%
	Penyediaan alat tulis kantor	Belanja Alat Tulis Kantor	115 jenis	75,000,000	23	12,134,000	23	15,000,000	23	15,000,000	100%	100.00%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	174,765 lembar	99,999,500	46,436	16,791,100	34,953	19,999,900	34,953	19,999,800	100%	100.00%
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Alat listrik dan Kebersihan	755 buah	28,000,000	138	4,981,800	151	5,600,000	151	5,599,000	100%	99.98%



1	2	3	4		5		6		7		8	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	surat kabar harian regional	6,240 buah	16,000,000	1,248	2,040,000	1,248	3,200,000	1,248	3,200,000	100%	100.00%
	Penyediaan makanan dan minuman	Makan Minum harian pegawai, rapat dan tamu	36,145 buah	210,379,000	12,960	41,532,500	7,229	42,075,800	7,229	40,926,400	100%	97.27%
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	perjalanan dinas luar daerah	145 op	1,158,262,380	29	99,561,100	29	231,652,476	29	231,479,508	100%	99.93%
	Penyediaan jasa non PNS	honorarium jasa non PNS	1,380 ob	1,626,000,000	300	370,080,000	276	325,200,000	276	323,930,000	100%	99.61%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase keluhan pengaduan layanan internal yang ditindaklanjuti	100%	1,819,960,000	78.05%	403,257,150	100%	412,942,000	92.58%	382,283,700	92.58%	92.58%
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung Kantor	100%	120,500,000	99.25%	39,700,000	100%	24,100,000	100.00%	24,100,000	100%	100.00%
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	100%	124,250,000	89.30%	26,700,000	100%	24,850,000	87.93%	21,850,000	87.93%	87.93%
	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil jabatan	BBm, Jasa Servis, suku cadang, pelumas, perpanjangan STNK	100%	174,640,000	93.20%	32,616,550	100%	34,928,000	85.67%	29,924,550	85.67%	85.67%
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	BBm, Jasa Servis, suku cadang, pelumas, perpanjangan STNK	100%	1,249,820,000	83.05%	191,460,600	100%	249,964,000	91.35%	228,347,650	91.35%	91.35%
	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perawatan perlengkapan gedung kantor	100%	13,000,000	94.12%	2,400,000	100%	2,600,000	100%	2,600,000	100%	100.00%



1	2	3	4		5		6		7		8	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	100%	54,000,000	94.44%	10,200,000	100%	10,800,000	99.09%	10,701,500	99.09%	99.09%
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	belanja modal rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	100%	328,500,000	99.23%	166,580,000	100%	65,700,000	98.57%	64,760,000	98.57%	98.57%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkat disiplin aparatur	100%	587,250,000	99.06%	209,057,000	100%	117,450,000	98.82%	116,060,000	98.82%	98.82%
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Persentase pakaian dinas dan kelengkapannya	100%	587,250,000	99.06%	209,057,000	100%	117,450,000	98.82%	116,060,000	98.82%	98.82%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	219,000,000	0.00%	-	100%	43,800,000	0.00%	-	0.00%	0.00%
	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan non formal	100%	219,000,000	0.00%	-	100%	43,800,000	0.00%	-	0.00%	0.00%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai hasil evaluasi AKIP	A	439,399,019	CC	241,881,019	CC	49,379,500	CC	47,865,400	CC	96.93%
		Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%		100%		100%		100.00%			
	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan tepat waktu	100%	191,173,000	99.79%	46,164,150	100%	38,234,600	100%	38,234,600	100%	100.00%
	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen aset/barang daerah	Inventarisasi aset/barang Dishub	100%	55,724,500	99.83%	29,937,670	100%	11,144,900	76.07%	9,630,800	76.07%	86.41%



1	2	3	4		5		6		7		8	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Prasarana dan Pelayanan Angkutan Umum di Terminal	80%	1,978,763,250	50%	116,234,699	50%	386,052,650	61.20%	289,990,150	61.20%	75.12%
	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	Tersosialisasinya peraturan perparkiran	5 Keg	363,054,500	1	49,544,500	1	72,610,900	1	55,013,300	100%	75.76%
	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Persentase terkelolanya terminal angkutan darat	100%	987,949,500	91.27%	36,741,999	100%	197,589,900	89.84%	185,250,000	89.84%	93.75%
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tertib perparkiran di Kota Banjarbaru	100%	577,759,250	20.98%	3,969,500	100%	115,551,850	42.77%	49,426,850	42.77%	42.77%
	Pelaksanaan Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN)	Expose Wahana Tata Nugraha (WTN)	5 keg	50,000,000	1	25,978,700	1	300,000	1	300,000	100%	100%
7	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase fasilitas lalu lintas angkutan jalan yang berfungsi dengan baik	100%	628,239,500	97.50%	204,310,000	100%	125,647,900	98.34%	123,562,550	98.34%	98.34%
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Halte/Shelter	Persentase terpeliharanya Halte	100%	257,200,000	100%	146,235,000	100%	51,440,000	97.47%	50,140,000	97.47%	97.47%
	Rehabilitasi/pemeliharaan rambu jalan dan lampu peringatan	Persentase terpeliharanya rambu lalu lintas dan lampu peringatan jalan	100%	371,039,500	100%	58,075,000	100%	74,207,900	98.94%	73,422,550	98.94%	98.94%
8	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase beroperasinya angkutan yang aman, nyaman, tertib, dan lancar	100%	4,769,812,000	80%	403,134,900	80%	694,437,800	75%	615,155,800	93.75%	88.58%



1	2	3	4		5		6		7		8	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di jalan raya	Terlaksananya pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di jalan	15 keg	467,980,000	3	233,990,000	3	49,086,250	3	43,134,250	100%	87.87%
	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	Load factor angkutan umum	25%	253,824,750	25%	55,506,300	25%	50,764,950	25%	50,476,450	100%	99.43%
	Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Pemilihan sopir/juru mudi angkutan umum teladan (AKUT)	5 keg	243,734,000	1	51,748,800	1	48,746,800	1	46,554,800	100%	95.50%
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Tersedianya angkutan umum melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan perkotaan	100%	2,706,755,250	2.29%	1,823,200	100%	541,351,050	86.91%	470,513,550	86.91%	86.91%
	Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	100%	106,839,000	100%	21,367,800	100%	3,952,950	99.70%	3,940,950	99.70%	99.70%
	Pemilihan pelajar pelopor berlalu lintas	Pemilihan dan pemberian penghargaan pelajar pelopor keselamatan LLAJ	5 Keg	2,679,000	1	38,698,800	1	535,800	1	535,800	100%	100.00%
9	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan	100%	494,000,000			100%	123,500,000	98.14%	121,200,000	98.14%	98.14%
	Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal	Pembangunan Halte bus	5 buah	494,000,000			2	123,500,000	2	121,200,000	100%	98.14%
10	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Cakupan penyebab kemacetan lalu lintas yang teratasi	100%	4,154,010,000	100%	694,781,400	100%	925,654,200	100%	844,733,050	100.00%	91.26%
	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas	549 buah	1,064,220,000	125	145,716,800	106	212,844,000	106	181,699,600	100%	85.37%



1	2	3	4		5		6		7		8	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pengadaan lampu peringatan jalan	Jumlah pemasangan warning light	19 buah	961,585,000	3	148,900,000	4	192,317,000	4	209,205,550	100%	108.78%
	Pengadaan Water Barrier	Pengadaan water barrier	150 buah	316,174,000			75	158,087,000	75	186,680,000	100%	118.09%
	Pengadaan marka jalan	Pengecatan marka jalan	7,350 meter	1,115,185,000	1,350	194,813,100	1,500	223,037,000	1,500	115,192,900	100%	51.65%
	Pengamanan lalu lintas jalan dan pengawalan	Jumlah titik pantau penyebab kemacetan	30 titik	696,846,000	6	205,351,500	6	139,369,200	6	151,955,000	100%	109.03%
11	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Cakupan kelaikan pengoperasian kendaran bermotor yang laik jalan	100%	546,800,500	90%	123,676,800	90%	109,360,100	90%	100,467,100	100%	91.87%
	Pengawasan dan pembinaan kelaikan kendaraan bermotor	Jumlah angkutan orang dan barang yang laik jalan	6,500 buah	211,050,000	5,809	53,106,200	5,250	42,210,000	5,135	39,690,000	97.81%	94.03%
	Pendataan/Pembinaan Usaha Perbengkelan Umum	Jumlah perbengkelan umum yang didata dan dibina	400 kali	116,387,500	80	34,603,900	90	23,277,500	90	23,192,500	100%	99.63%
	Monitoring dan pembinaan usaha perbengkelan umum	Jumlah perbengkelan umum yang didata dan dibina	830 kali	219,363,000	150	35,966,700	166	43,872,600	166	37,584,600	100%	85.67%
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								3,721,150,326		3,352,740,383		90.10%



Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

Uraian	Program/ Kegiatan	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Persentase fasilitas lalu lintas angkutan jalan yang berfungsi dengan baik	Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	35,544,850	49,217,950	28,440,000	35,915,000	166,000,000	35,544,850	47,530,450	28,440,000	35,915,000	162,140,400	100.00%	96.57%	100.00%	100.00%	97.67%		
Persentase meningkatnya penggunaan prasarana pelayanan angkutan umum di terminal	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	51,996,200	87,592,500	71,724,900	118,725,500	260,722,000	49,911,200	66,858,250	63,597,300	107,614,900	217,879,719	95.99%	76.33%	88.67%	90.64%	83.57%		
Cakupan penyebab kemacetan lalu lintas yang teratasi	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas	554,642,750	859,833,600	745,602,350	1,123,130,000	1,573,615,500	492,468,550	529,892,550	685,943,750	740,741,900	1,335,614,000	88.79%	61.63%	92.00%	65.95%	84.88%		
Persentase beroperasinya angkutan yang aman dan nyaman	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	39,824,900	45,843,800	217,302,500	245,665,400	370,315,900	39,824,000	38,699,900	163,375,100	206,462,900	218,046,500	100.00%	84.42%	75.18%	84.04%	58.88%		
Persentase kendaraan yang laik jalan	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	73,947,400	55,107,000	31,574,100	203,035,000	166,296,100	69,880,800	39,337,000	29,949,100	196,053,200	152,318,100	94.50%	71.38%	94.85%	96.56%	91.59%		
Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	507,570,150	538,515,800	565,373,000	545,889,700	632,820,900	447,354,172	484,090,146	532,194,467	521,418,569	585,950,441	88.14%	89.89%	94.13%	95.52%	92.59%		
Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	135,980,000	337,356,000	366,751,000	520,441,450	656,018,500	127,541,950	207,712,050	326,405,850	415,665,175	617,815,200	93.79%	61.57%	89.00%	79.87%	94.18%		
Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	50,203,350	77,552,000	77,528,500	82,555,000	117,085,000	48,603,350	75,414,500	69,886,000	76,330,000	90,585,000	96.81%	97.24%	90.14%	92.46%	77.37%		
Nilai Evaluasi AKIP	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	39,999,950	64,241,400	58,291,300	68,099,800	106,364,950	37,804,525	57,776,450	52,390,800	61,776,300	101,199,500	94.51%	89.94%	89.88%	90.71%	95.14%		



Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

No	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(6)
1	Persentase fasilitas lalu lintas angkutan jalan yang berfungsi dengan baik		100%		%	80	85	90	90	100	80	85	90	90	100	100	100	100	100	100
	- Jumlah fasilitas lalu lintas angkutan jalan yang berfungsi dengan baik		27 buah		Buah	17	19	21	23	27	17	19	21	23	27	100	100	100	100	100
	- Terpeliharanya rambu lalu lintas dan lampu peringatan		24 rambu		Rambu	14	16	18	20	24	14	16	18	20	24	100	100	100	100	100
	- Jumlah halte/shelter yang terpelihara		3 buah		Buah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100
2	Persentase meningkatnya penggunaan prasarana pelayanan angkutan umum di terminal		80%		%	70	75	75	80	80	70	75	75	80	86,96	100	100	100	100	100
	- Jumlah armada angkutan umum yang memanfaatkan prasarana dan fasilitas di terminal		50 armada		armada				50	50				50	50					100
	- Pelaksanaan sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan		1 kegiatan		Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	- Pengawasan angkutan orang, angkutan barang dan angkutan lebaran		3 kegiatan		Kegiatan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100
	- Pengumpulan dan analisis database pelayanan angkutan		1 dokumen		dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan penyebab kemacetan lalu lintas yang teratasi		100%		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	- Jumlah titik pantau (jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten)		6 titik pantau		Titik pantau	4	5	6	6	6	4	5	6	6	6	100	100	100	100	100



	- Tersedianya ranbu-rambu lalu lintas	106 buah	Buah						106					106					100
	- Terpasang lampu peringatan jalan	1 buah	buah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	- Terlaksananya pengamanan lalu lintas jalan dan pengawalan pejabat daerah	12 bulan	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	- Jumlah marka jalan	1.500 meter	meter	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500					1.500					100
4	Persentase beroperasi angkutan yang aman dan nyaman	80%	%	80%	80%	80%	80%	80%	80%					75%					93.75
	- Jumlah pelajar yang memanfaatkan angkutan gratis	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	- Load factor angkutan umum	25 %	%	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25					100
	- Pemilihan dan pemberian penghargaan pelajar pelopor Keselamatan LLAJ	1 Kegiatan	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					100
	- Jumlah operasional angkutan pelajar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	- Jumlah armada angkutan pelajar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Persentase kendaraan yang laik jalan	85%	%	85	85	85	85	85	85	83.12	83.16	83.25	84.08	84.16	100	100	100	100	100
	- Jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji	6.000 buah	Buah						6.000					5.135	100	100	100	100	100
	- Pengawasan dan pembinaan kendaraan wajib uji	12 bulan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	- Pendataan dan pembinaan usaha perbengkelan umum	90 kali	Kali	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	100	100	100
6	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	Baik	Opini	Baik	100	100	100	100	100										
	- Persentase pelayanan tugas rutin perkantoran	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
7	Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100



	- Persentase sarana aparaturnya yang terpelihara dengan baik		100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
8	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur		100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
	- Persentase jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
9	Persentase tingkat kapasitas SDM aparaturnya		100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
	- Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya		100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
9	Nilai Evaluasi AKIP		CC	Nilai						CC				CC						100
	Persentase realisasi fisik dan Keuangan		100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
	- Tersedianya Rencana Strategis Dishub		1 dokumen	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	- Tersedianya rencana kerja Dishub		1 dokumen	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	- Tersedianya perjanjian kinerja Dishub		1 dokumen	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	- Tersedianya Laporan Kinerja Dishub		1 dokumen	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100



Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

No	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(6)
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal		Baik		Opini	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	100	100	100	100	100
	- Persentase pelayanan tugas rutin perkantoran		100%		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
2	Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti		100%		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
	- Persentase sarana aparatur yang terpelihara dengan baik		100%		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
3	Tingkat alat pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar pengujian		100%		%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	- Persentase jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%		%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

No	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(6)
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal		Baik		Opini	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	100	100	100	100	100
2	Persentase Tertib Perparkiran Dikota Banjarbaru		100%		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100



5.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

5.4.1. Tantangan

- a. Kesempatan yang masih belum digali di bidang Perhubungan harus segera direncanakan menjadi suatu proyek/kegiatan yang dilaksanakan guna peningkatan pendapatan asli daerah.
- b. Data dan informasi yang masih kurang akan terus dikembangkan untuk pendukung bahan analisis proses perencanaan di bidang perhubungan.
- c. Fasilitas, sarana dan prasarana yang seadanya mampu dimaksimalkan dengan baik untuk pengembangan pelayanan terhadap masyarakat.

5.4.2. Peluang

Peluang merupakan situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif, yang membantu organisasi mencapai visi dan misi. Peluang pengembangan Pelayanan yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru meliputi :

1. Adanya kepedulian masyarakat dalam pembangunan kota khususnya yang berhubungan dengan masalah perhubungan.
2. Luas wilayah yang relatif kecil, sehingga akan memudahkan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Adanya pelatihan, pendidikan dan kursus bagi tenaga pelaksana untuk meningkatkan sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan, sehingga pelayanan yang ditujukan pada masyarakat dapat terlaksana dengan baik.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

8.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

3.1.1 Bidang Lalu Lintas Jalan

Terjadinya kemacetan di kawasan perkotaan, terjadi pada ruas-ruas jalan dikawasan perkotaan di Kota Banjarbaru, disebabkan tidak seimbang nya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan perkembangan ruas jalan.

3.1.2 Bidang Angkutan Jalan

- a. Masih terbatasnya jangkauan pelayanan angkutan jalan. masih diperlukan infrastruktur jalan untuk menjangkau wilayah pedesaan dan terpencil terutama daerah yang berpotensi cepat tumbuh sehingga jangkauan pelayanan untuk angkutan jalan juga terbatas.
- b. Belum tersedianya sarana dan prasarana angkutan massal berbasis jalan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas angkutan jalan dan pelayanan jasa transportasi angkutan orang, barang dan jasa yang murah.
- c. Untuk menindaklanjuti pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan terminal Type A dan Type B masih ada kendala dalam pelimpahan aset dan SDM yang mengelola terminal terkait dengan status terminal dan status SDM pengelola terminal.

8.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri



Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Walikota dan Wakil Walikota, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2017-2021, yaitu :

**"TERWUJUDNYA BANJARBARU SEBAGAI
KOTA PELAYANAN YANG BERKARAKTER"**

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kota Banjarbaru yang ingin diwujudkan dalam lima tahun mendatang adalah Banjarbaru sebagai kota pelayanan yang berkarakter karena pelayanan aparatur publiknya, sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru harus meningkatkan pelayanannya melalui 2 (dua) aspek penting, yaitu:

1. Sumber daya manusia yang berkarakter yaitu terciptanya sumber daya manusia yang sehat, mempunyai etos kerja tinggi dan berakhlak mulai berdasarkan nilai-nilai religius
2. Kota yang berkarakter, yaitu sebuah kota yang mempunyai ciri khas sebagai kota yang tertata direncanakan (*urban design*) sehingga menjadi tempat hunian yang indah, aman dan nyaman yang berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi pembangunan daerah tahun 2017-2021 adalah :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia.
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas dan berwawasan lingkungan.
3. Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan.
4. Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintah yang baik berbasis teknologi informasi.



5. Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib.

8.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021, maka Visi dan Misi dalam RPJMD adalah :

Visi :

“ Kalsel Mapan (Maju dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing “

Misi :

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil.
2. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
3. Memantapkan kondisi sosial budaya daerah yang berbasis kearifan lokal.
4. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.
5. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumberdaya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021, maka Dinas Perhubungan akan mendukung pelaksanaan misi mewujudkan tatakelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik dan mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan budaya sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.



8.3.1. Renstra Kementerian Perhubungan 2015-2019

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan mempunyai maksud untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program Kementerian Perhubungan dalam kurun waktu 2015-2019.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan adalah memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perhubungan di bidang pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan transportasi dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas manusia dan barang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah yang terintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan dapat diuraikan arah kebijakannya sebagai berikut :

Arah Kebijakan Rencana Strategis 2015-2019 Kementerian Perhubungan

No	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Menurunnya angka kecelakaan	Meningkatkan keselamatan transportasi	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi• Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha• Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi• Penguatan kelembagaan
2.	Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi	Meningkatkan keamanan transportasi	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar kamanan transportasi.• Peningkatan koordinasi dalam rangka mencegah terjadinya tindakan melawan hukum di sektor transportasi.



3	Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	Meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kehandalan sarana dan prasarana transportasi serta penataan jaringan/rute • Penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi • Implementasi standar pelayanan publik pada
4	Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan komponen sesuai dengan kebutuhan	Memenuhi SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kapasitas diklat SDM transportasi. • Menata regulasi penyelenggaraan diklat SDM transportasi. • Meningkatkan tata kelola diklat dan kualitas lulusan. • Meningkatkan penyerapan lulusan diklat transportasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perhubungan dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

**Permasalahan Pelayanan
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan
Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Menurunnya angka kecelakaan	Kurang memadainya sarana, prasaraa serta pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan	Kurangnya pemeliharaan sarana, prasaraa serta pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan	Terus dikembangkannya sarana, prasaraa serta pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan



2.	Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi	Kurang memadainya penanganan gangguan keselamatan transportasi	Kurang memadainya penanganan gangguan keselamatan transportasi	Terus meningkatkan penanganan gangguan keselamatan transportasi
3.	Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	Belum optimalnya kinerja pelayanan transportasi	Belum optimalnya kinerja pelayanan transportasi	Terus meningkatkan kinerja pelayanan transportasi
4.	Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan komponen sesuai dengan Kebutuhan	Perlunya peningkatan kualitas SDM dalam bidang perhubungan baik dalam jumlah dan komponen sesuai kebutuhan	Kurangnya SDM dalam bidang perhubungan baik dalam jumlah dan komponen sesuai kebutuhan	Terus dikembangkan SDM bidang perhubungan

8.3.2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

➤ Visi dan Misi

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk untuk mendukung visi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 “**Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing**”.

Dinas perhubungan secara khusus mendukung misi pembangunan keempat yaitu “**Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya**” dengan Prioritas Kalsel Dengan Infrastruktur Yang Berkualitas.

➤ Tujuan

Penyelenggaraan kegiatan transportasi, yang efektif berkaitan dengan keselamatan, kenyamanan dan kenyamanan, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan kemampuan pengembangan dan penerapan teknologi yang berdampak kepada maksimalisasi daya guna dan minimalisi biaya yang menjadi beban masyarakat.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Kalimantan Selatan, Dinas Perhubungan mempunyai tujuan untuk meningkatkan Penyediaan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan keseluruhan wilayah Kalimantan Selatan Sesuai dengan tata ruang.



➤ **Sasaran**

Sasaran pembangunan Dinas Perhubungan pada tahun 2018 yang akan diformulasikan rencana strategis, untuk menciptakan sistem transportasi handal, aman, nyaman dan selamat diperlukan komitmen bersama yang kuat oleh Dinas Perhubungan dan instansi terkait lainnya, sebagaimana tabel berikut :

Tujuan		Sasaran	
1	Meningkatkan penyediaan dan pemerataan pembangunan infrastruktur ke seluruh wilayah sesuai dengan tata ruang	1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas
		2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur perekonomian

➤ **Strategi**

Kebijakan pengembangan transportasi di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan bagian tak terpisahkan dalam pengembangan wilayah sesuai dengan struktur tata ruang yang diharapkan. Maka dalam rangka mencapai sasaran dimaksud, sistem transportasi dikembangkan ke arah terpadunya intra dan antar moda transportasi baik darat, laut maupun udara, sasaran dan strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :



Strategi	Arah Kebijakan
1. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar di daerah 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perekonomian di daerah	1. Meningkatkan konektivitas antar wilayah baik untuk kawasan produksi dengan kawasan industri dan pelabuhan serta mengatasi peningkatan kuantitas moda lalu lintas 2. Membuat sistem informasi jaringan jalan dan jembatan provinsi yang dapat di akses masyarakat, untuk memberikan masukan terhadap kondisi dan usulan perbaikan jalan, sehingga perbaikan dapat segera ditangani. 3. Mendorong dan mempercepat pembebasan lahan 4. Membangun moda transportasi masal (pembangunan BRT) 5. Mendorong percepatan pembangunan angkutan sistem jaringan (kereta api) 6. Mendorong/fasilitasi Pengembangan Pelabuhan dan Bandara udara (Syamsudin Noor, Warukin dan Syamsir Alam) 7. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan seluruh wilayah 8. Penyediaan sarana prasarana fasilitas perhubungan untuk keselamatan berkendara 9. Penyediaan sarana prasarana fasilitas perhubungan untuk keselamatan di angkutan sungai danau dan penyeberangan

3.6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Hasil telaahan terhadap rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategi dan arahan kebijakan ruang, maka mengacu kepada rencana struktur ruang RTRW Kota Banjarbaru, maka rencana pengembangan transportasi meliputi ;

Sistem jaringan transportasi darat meliputi ; jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri atas jaringan jalan (jaringan jalan nasional pada wilayah Kota, jaringan jalan provinsi pada wilayah kabupaten), jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi terminal penumpang dan terminal barang.

3.7. Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

Berdasarkan pada gambaran pelayanan Dinas Perhubungan, visi, misi dan program Kepala Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RT RW bagi pelayanan Dinas Perhubungan dan identifikasi masalah



tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sebagai berikut :

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1 Belum maksimalnya kualitas pelayanan internal	Meningkatkan kualitas pelayanan internal	Persentase Tingkat pelayanan internal	1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Survei Kepuasan Masyarakat
2 Masih belum maksimalnya sistem lalu lintas dan angkutan kota yang tertib dan lancar	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan dan kinerja operasional sistem transportasi perkotaan	Penghargaan Wahana Tata Nugraha	2 Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Transportasi	a. Persentase alat Transportasi yang memenuhi standar b. <i>Load Factor</i> Angkutan Umum c. Persentase kebutuhan transportasi pelajar yang terpenuhi
			3 Meningkatkan Kelancaran Berlalu lintas	Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi
4 Masih belum maksimalnya potensi PAD perparkiran di Kota Banjarbaru	Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	4 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor Perhubungan	Persentase PAD Sektor Perhubungan



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

12.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang, tujuan juga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi suatu instansi atau organisasi.

4.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam sasaran dirancang juga indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Sasaran jangka menengah berdasarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru adalah:

1. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan, dengan cara :**

- .Penyediaan sarana aparatur dan sarana publik yang berkualitas.
- Implementasi standar pelayanan publik pada sarana dan prasarana transportasi.
- Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, bila perlu adanya penambahan personel.



2. **Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Transportasi, dengan cara:**
 - Meningkatkan kendaraan angkutan yang laik jalan.
 - Penyediaan angkutan umum untuk pelajar yang gratis dan bersubsidi.
 - Meningkatkan Kualitas Transportasi angkutan darat agar berfungsi dengan baik untuk memperlancar arus lalu lintas
3. **Meningkatnya Kelancaran Berlalu lintas, dengan cara :**
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perhubungan, guna terciptanya kenyamanan bagi pengguna angkutan umum.
 - Meningkatkan kelancaran akses lalu lintas pada titik-titik kemacetan yang ada.
4. **Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Sektor Perhubungan, dengan cara :**
 - Mewujudkan pengelolaan data parkir melalui Bank data perparkiran
 - Mewujudkan optimalisasi penerimaan PAD dari sektor retribusi parkir
 - Mewujudkan Monitoring dan Evaluasi



Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (Tahun 2016)	Target Indikator Kinerja Sasaran				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan kualitas pelayanan internal	1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Survei Kepuasan Masyarakat	75%	80%	85%	85%	90%	95%
2	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan dan kinerja operasional sistem transportasi perkotaan	2 Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Transportasi	Persentase alat Transportasi yang memenuhi standar	25%	25%	30%	30%	35%	35%
			<i>Load Factor</i> Angkutan Umum	25%	25%	26%	26%	27%	27%
			Persentase kebutuhan transportasi pelajar yang terpenuhi	-	55%	55%	60%	60%	65%
		3 Meningkatkan Kelancaran Berlalu lintas	Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir	4 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor Perhubungan	Persentase PAD Sektor Perhubungan	80%	85%	90%	90%	95%	100%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

12.2. Strategi dan Kebijakan

1) Strategi

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program, antara lain.

- a. Mengendalikan kemacetan lalu lintas yaitu dengan melengkapi fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, marka parkir, rekayasa lalu lintas, penertiban parkir liar dan sebagainya.
- b. Mengoperasikan angkutan umum massal yang aman, nyaman dan relatif terjangkau dapat menarik kembali pengguna transportasi umum yang sempat beralih ke kendaraan pribadi (khususnya sepeda motor) dengan mengoperasikan Sarana Angkutan Umum Massal. Selain kenyamanan tidak kalah pentingnya adalah faktor keselamatan, maka faktor kelaikan kendaraan menjadi faktor penting untuk disikapi dengan melengkapi perangkat pengujian kendaraan bermotor.
- c. Meningkatkan prasarana dan fasilitas perhubungan seperti penyediaan halte angkutan umum yang layak dan memadai sehingga bisa memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa transportasi untuk lebih tertib menunggu sarana transportasi umum. Juga keberadaan terminal dengan segala fasilitas penunjang yang layak bagi penumpang/pengguna jasa transportasi umum bisa meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
- d. Meningkatkan SDM Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru untuk mengikuti beberapa Diklat baik Teknis maupun non Teknis juga melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dan kantor yang memadai.

2) Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru adalah:

- a. Meningkatkan keselamatan transportasi, *melalui* :
 - Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi
 - Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi
- b. Meningkatkan keamanan transportasi *melalui* :
 - Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan transportasi
 - Peningkatan koordinasi dalam rangka mencegah terjadinya tindakan melawan hukum di sektor transportasi.
- c. Meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, *melalui* :
 - Peningkatan kehandalan sarana dan prasarana transportasi serta penataan jaringan/rute
 - Penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi
 - Implementasi standar pelayanan publik pada sarana dan prasarana transportasi
- d. Memenuhi SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai kebutuhan *melalui* :
 - Mengembangkan kapasitas diklat SDM transportasi.
 - Menata regulasi penyelenggaraan diklat SDM transportasi.
 - Meningkatkan tata kelola diklat dan kualitas lulusan.
 - Meningkatkan penyerapan lulusan diklat transportasi.





Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

VISI : Mewujudkan Pelayanan Bidang Perhubungan Yang Berkualitas dan Berkarakter

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Misi 1 : Memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan.							
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Internal	1.1	Meningkatkan kualitas pelayanan	1.1.1	Meningkatkan Angka Survei Kepuasan Masyarakat	•	Pengembangan survey kepuasan masyarakat yang tertata dan terarah dengan baik
2.	Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan dan kinerja operasional sistem transportasi perkotaan	2.1	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan transportasi	2.1.1	Meningkatkan infrastruktur fasilitas jalan yang nyaman, berkualitas dan merata	•	Penyediaan sarana angkutan pelajar gratis
		2.2	Meningkatnya Kelancaran berlalu lintas	2.2.1	Mengembangkan titik-titik jalan yang berpotensi menyebabkan kemacetan	•	Penyediaan sarana dan fasilitas perhubungan untuk menunjang titik-titik yang menyebabkan kemacetan
Misi 2 : Memanfaatkan penggunaan sarana dan prasarana, fasilitas lalu lintas guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah							
1.	Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sector retribusi parker parkir	1.1	Meningkatnya pendapatan asli daerah sektor perhubungan	1.1.1	Meningkatkan pengelolaan perparkiran dengan cara monitoring dan evaluasi	•	Mengembangkan potensi pengelolaan perparkiran



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru selama kurun waktu 5 (lima) tahun, berbagai kemungkinan dapat saja terjadi yang akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung baik sebagai factor pendorong maupun penghambat kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan adalah sebagai berikut:



